HARIAN UMUM
NusaBali

Pemkab Badung Kembali Helat FBP ke-4

★ Kerjasama Petani dengan Pengusaha Senilai Rp 8,1 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Festival Budaya Pertanian (FBP) kembali digelar tahun ini. Pelaksanaannya yang akan dihelat 4-7 Juli mendatang di Kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, merupakan kegiatan yang ke-4. FBP digelar dalam rangka membangun citra Badung utara dengan memanfaatkan potensi pertanian dan keindahan alam yang eksotik dan semakin ramai dikungjungi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, (DP2K) Badung IGAK Sudaratmaja, Kamis (2/7) menyatakan, festival yang digelar kali ini tidak saja bagaimana mempromosikan potensi pertanian, tetapi yang utama adalah penginvestasian dan pengedukasian masyarakat bagaimana sektor pertanian ternyata bisa bersinergi dengan pariwisata. "Output ada didalamnya nilai investasi, edukasi, sehingga dari kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing Badung Utara," ucapnya.

Tahun ini FBP bertemakan 'Suksma Dresta Laksana' yang artinya 'Berterima Kasih adalah Kewajiban Mulia'. Menurut Sudaratmaja, tema ini merujuk pada periode berakhirnya masa jabatan Bupati Badung AA Gde Agung pada 5 Agustus 2015 mendatang.

"Kita harus mengakui bapak bupati akan meninggalkan jabatannya. Makanya tema ini diambil sebagai ucapan terima kasih. Bapak bupati berterima kasih kepada masyarakat, masyarakat berterima kasih kepada bupati," katanya. Bahkan, imbuh Sudaratmana, tema ini juga bermakna ungkapan rasa terimakasiha petani kepada alam, atas hasil panen yang mereka/petani dapat.

Lebih lanjut dikatakan, dari pengalaman tiga kali festival, pemerintah mengklaim adanya nuansa budaya pertanian yang ternyata direspon sangat positif oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pengalaman dan pengamatan di masyarakat, dimana potensi dan emosi seni masyarakat Bali, memang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dapat dipakai untuk menawarkan ide-ide pembaharuan dan penguatan eksistensi pembangunan, khususnya pembangunan pertanian di masyarakat.

Berkacamata pada pengalaman, kata Sudaratmaja, kegiatan FBP tidak secara seremonial belaka. Sebagai bukti dari tahun ke tahun adanya perubahan respon masyarakat yang awalnya apatis menjadi semakin bergairah. "Sekarang yang ingin ikut berjualan, maupun keterlibatan saat pembukaan festival makin meningkat," jelasnya.

● NUSABALI/YUDA

Kabag Humas dan Protokol Setda AA Gede Raka Yuda bersama pejabat di Pemkab Badung beri keterangan terkait FBP, kemarin.

Tidak itu saja, komoditi seperti sayuran asparagus, kopi, beras organik, jambu biji, jambu kristal, jeruk, bunga kumiter, kedelai edamame, sudah semakin familiar di Badung Utara. "Bila menyebut asparagus, sekarang langsung yang disebut Badung Utara. Ini bukti bahwa FBP memberikan dampak positif," tegasnya. Selain itu pada FBP kali ini, juga akan diperkenalkan teh gumitir. Sehingga masyarakat bisa mengetahui ternyata bungan gumiter bisa jadi sulap menjadi teh gumitir.

Meski baru dilaksanakan tiga kali, dan pelaksanaan tahun 2015 ini adalah kegiatan FBP ke-4, namun pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus. Malah, kata Sudaratmaja, tahun 2014 lalu, FBP sudah mampu keluar sebagai 'Top 99' Inovasi Pelayanan Publik, menyisihkan lebih dari 500 peserta lomba dari Kementrian, Lembaga, Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dan tahun 2015, bebernya lagi, Kabupaten Badung kembali berjaya dengan prestasi yang lebih membanggakan. Dari tiga inovasi yang dilombakan, kegiatan yang masuk nominasi, masing-masing 'Top 25', 'Top 40' dan 'Top 99' untuk pertanian (Asparagus) kebersihan dan pertamanan (Gelatik) dan kesehatan (Kanker Servik).

Sudaratmaja menambahkan, pada FBP ke-4 tahun ini Pemkab Badung telah melakukan. MoU dengan sembilan perusahaan. Nilai kontrak kerjasama itu total Rp 8,1 miliar. Jenis produk pertanian yang masuk kontrak dengan pihak perusahaan antara lain kopi, aneka sayuran, buah, bunga gumitir, beras organik, edamame, jambu kristal, jeruk siam. Untuk nilai tertinggi adalah Jambu kristal dan jeruk siam senilai Rp 600 juta. Kontrak selama satu tahun bahkan dengan tiga swalayan sekaligus.

Disinggung terkait pelaksanaan FBP yang bersamaan dengan PKB, apakah tidak ada kekhawatiran? Sudaratmaja menepisnya. "FBP ini berbeda dengan PKB. Segmennya berbeda. Jadi kami tida perlu khawatir," tandasnya.

Kepala Desa Pelaga, I Gusti Lanang Umbara menyatakan, FBP saat pertama kali digelar sampai sekarang menginjak tahun ke-4, cukup besar greget masyarakat. Pertama bagaimana Desa Plaga, Petang, dikenal akibat FBP. "Pelaga ini semakin top dengan adanya FBP ini. Hal positif lainnya ada pembelajaran bagi masyarakat," ucapnya.

Sekarang, imbuhnya, banyak masyarakat yang antusiasi untuk terlibat dalam FBP cukup tinggi. "Ini bukti jika FBP berpengaruh besar bagi masyarakat," tandas Umbara sembari berucap agar FBP bisa terselenggara secara berkesinambungan.

Ketua Kelompok Hare Jaya Agro, Mangku Ruja menambahkan, FBP sangat besar dampaknya dan harus dipertahankan. Bahkan, bila perlu diperpanjang waktu pelaksanaannya. "Idealnya mungkin 5 hari. Dan itu harapan kami petani," imbuhnya. **@ as**

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

PPTPA Surati Wagub, Minta Tegasi Kisruh Kasus GWK

MANGPURA,NusaBali

Riak sengketa yang terjadi antara pengusaha lokal yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik Toko Plaza Amata (PPTPA) dengan investor pengelola objek Garuda Wisnu Kencana masih mengalir. Kali ini, PPTPA bersurat ke Wakil Gubernur Bali guna menyampaikan usul dan sejumlah aspirasi terkait pengelola kawasan Garuda Wisnu Kencana yang sebelumnya melakukan penembokan dan pelarangan buka toko dan jalan masuk ke pertokoan tersebut.

"Apa yang dilakukan pengelola GWK sudah menyimpang dari pengelola sebelumnya, sebab akses jalan tersebut adalah jalan umum (fasilitas umum). Disamping itu sekitar bulan Juli 2014 membangun jalan 'rurung agung' melalui lahan milik Putu Antara yang ada sertifikatnya. Ada pengerukan lahan dengan alat berat dan pengaspalan tanpa memberi tahu pemilik sah dan tidak pernah minta izin," kata Wakil Ketua PPTPA, Sudiarta Indrajaya Kamis (2/7).

Ia mengatakan pembangunan jalan "rurung agung" itu dilakukan setelah unjuk rasa serta blokade massa dari warga Banjar Giri Dharma yang menuntut akses "rurung agung" seperti dijanjikan PT Garuda Adimatra Indonesia (PT GAIn) beberapa tahun sebelumnya. "Rurung agung" merupakan akses warga banjar untuk ke setra atau kuburan dan berada dalam kawasan GWK. Namun, tanpa minta izin pihak Putu Antara, manajemen GWK memindahkan akses "rurung agung" di antaranya melewati lahan milik Putu Antara.

"Walau ada indikasi tindak pidana penyerobotan dengan ancaman hukuman empat tahun menurut KUHP, kami belum membawa kasusnya ke penegak hukum, karena tidak mau dicap kurang menghargai GWK yang disakralkan orang Bali. Tapi, kesabaran kami ada batasnya. Kalau nanti kasusnya melebar kemana-mana, jelas yang menjadi sumber masalah bukanlah kami," katanya dilansir Antara.

Namun, kata dia, karena sampai sekarang tidak ada itikad baik, perilaku tidak terpuji PT GAIn ini diadukan ke Wagub Bali, melalui Surat No: 03/BI/PA/VI/15 tanggal 30 Juni. Surat juga ditembuskan ke sejumlah petinggi negara, seperti Presiden, DPR-RI, DPD-RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Komnas HAM, Kapolri, Ombudsman, sementara di Bali ditembuskan ke Gubernur, DPRD Bali, Bupati Badung dan DPRD Badung, PHDI Bali dan PHDI Badung dan sejumlah lembaga lainnya.

Surat PT BI dan Plaza Amata bermaksud mohon penjadwalan ulang pertemuan mediasi dengan PT GAIN maupun PT MMI (Multi Matra Indonesia), yang awalnya dijadualkan 29 Juni 2015. Karena mendadak digeser Wagub ke tanggal 1 Juli 2015, PT BI dan Plaza Amata meminta ditunda sampai sesudah 13 Juli, karena sebagian pengurus sudah punya jadwal acara, di antaranya ada yang keluar negeri.

Selain mohon penjadualan ulang, PT BI dan Plaza Amata juga meminta agar dalam rapat mediasi berikutnya, yang dihadirkan dari PT GAIN maupun PTMMI adalah pemilik yang berwenang mengambil keputusan, bukan semata-mata karyawan yang tidak bisa memutuskan apapun. Pihak PT BI dan Plaza Amata juga tetap meyakini dan mendukung pernyataan awal Wakil Gubernur, agar tembok di Plaza Amata dibongkar, fasum fasos dilepas,

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015
Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan

jalan yang telah ditinggikan di akses masuk dikembalikan seperti semula.

Wagub juga sangat diharapkan agar benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan antara PT GAIn dengan pemilik toko berdasarkan peraturan perundangan yang ada, di antaranya membongkar tembok, melepaskan jalan akses masuk ke plaza amata dan fasum fasos kepada negara. Surat-surat manajemen GWK yang melarang menggunakan akses masuk ke Plaza Amata, juga harus dicabut oleh yang bersangkutan.

Sudiarta meminta kepada Wagub Sudikerta yang telah menangani kisruh ini agar dapat menyelesaikan sampai tuntas, sehingga kasusnya tidak perlu masuk ke pengadilan ataupun melalui lembaga di pusat. Apalagi selama ini Wagub Bali sering menyatakan, tidak ada sengketa masyarakat yang tidak selesai tuntas di tangannya dan kami meyakini itu, terlebih kejadian ini di desa kelahiran pak Wagub dan ini mempertaruhkan citra pariwisata Bali.

"Bila kisruh GWK ini tidak tuntas dengan baik, kalau sampai pemilik toko yang telah 13 tahun berkorban tidak selesai di tangan Wagub, lalu terpaksa dicarikan penyelesaian ke Presiden, DPR, DPD atau Menteri. Kasihan reputasi Pak Wagub selama ini," ucapnya.

Sementara Putu Wirata Dwikora SH dan Made Dewantara Endrawan SH selaku kuasa hukum mengingatkan, kalau pemilik toko tidak mendapat keadilan, dan kesewenangan manajemen GWK dibiarkan berlanjut, pasti ada tanda tanya besar dibalik itu.

Karena itu, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan didesak untuk mengusut aset-aset negara yang diberikan untuk membantu pembangunan GWK melalui PT GAIn. Sebab berdasarkan informasi bahwa semasa kepemimpinan orde baru, ada sumbangan baja dari sebuah BUMN untuk membangun tubuh patung, ada sumbangan uang dari pemerintah, serta penyertaan modal PT BTDC (Bali Tourism and Development Corporation) Nusa Dua.

"Kemana semua itu, kok patungnya belum juga berdiri sampai sekarang. Disitu KPK penting untuk mengusut, agar ke depan tidak tersisa permasalahan lagi di GWK," kata Wirata. **ant, nat**

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

Rampung, Jalan Beton Udayana-Kartini Tunggu Uji Lab

SINGARAJA, NusaBali

Proyek betonisasi ruas Jalan Udayana- Kartini, Singaraja sepanjang 1,2 kilometer itu telah dinyatakan rampung. Hanya saja, jalan tersebut belum dibukan secara resmi untuk kendaraan dengan tonase tertentu.

Perbaikan kerusakan ruas jalan Udayana – Kartini dikerjakan sejak pertengahan bulan Maret lalu. Ruas jalan itu tidak lagi memakai aspal hotmix, tapi menggunakan material beton cor. Proyek itu dikerjakan oleh PT Aditya Sinar Pratama dengan nilai kontrak Rp 4,7 miliar. Sesuai kontrak, pekerjaan itu sudah harus rampung hingga 9 Juli 2015 nanti. Namun sebelum kontrak habis, pekerjaan tersebut sudah rampung. Kendati sudah dinyatakan rampung, ruas jalan tersebut masih ditutup.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng, Nyoman Gede Suryawan dikonfirmasi Rabu (1/7) mengatakan, pengoperasian itu masih menunggu hasil uji lab atas ketebalan dan kualitas dari beton tersebut. Pengujian ini diperkirakan berakhir sebelum waktu kontrak berakhir. "Pekerjaanya sudah rampung tinggal merapikan pekerjaanya yang belum kelar. Kami belum menerima pekerjanya karena menunggu hasil uji ketebalan beton untuk dicocokan dengan dokumen perencanaan," tegasnya.

Dijelaskan, hasil uji ketebalan dan pengujian teknis lainnya ini sudah tertuang dalam kontrak kerja yang mesti dipenuhi oleh pihak pemborong. Hasil pengujian terhadap ketebalan beton harus sesuai dokumen perencanaan yang sudah ada. "Jika hasilnya menunjukkan ketidak susesuaian dengan dokumen perencanaan, harus dilakukan penyempurnaan," ujarnya.

Di sisi lain Nyoman Gede Suryawan menyebut, meski ruas jalan tersebut belum dibuka secara resmi, pihaknya tidak bisa melarang kendaraan-kendaraan melintas di ruas jalan itu. Namun, sepanjang pengematannya kendaraan yang lewat itu adalah kendaraan dibawa tonase maksimal. "Kendaraan yang lewat itu masih batas toleransi, karena beratnya tidak begitu hanya sepeda motor dan kondaraan pribadi," terangnya.

Untuk diketahui, proyek betonisasi ini menalan anggaran yang bersumber dari APBD Buleleng senilai Rp 4,7 miliar dari total pagu anggaran senilai Rp 5 miliar. Ruas jalan ini dibeton lantaran kondisi tanahnya labil, berkali-kali perbaikan dengan aspal hotmix badan jalannya tetap saja bergelombang. Selain karena kodnisi tanah yang labil, kedua ruas jalan ini merupakan jalur untuk kendaraan dengan tonase tinggi, sehingga pemeirntah daerah memutuskan untuk melakukan betonisasi kedua ruas jalan tersebut. Dari proyek ini, badan jalan ini diperkirakan akan tahan sampai umur pemakaian hingga dua puluh tahun ke depan. k19

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 3